

BAB VI

PENUTUP

VI.1 KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dimana laut di Indonesia memiliki luas yang sangat luas, dan di dalamnya memiliki sumber daya laut yang sangat banyak. Namun dari semua itu hal ini menjadi salah satu faktor banyak terjadinya penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing. Hal tersebut memikat para nelayan dari negara lain untuk melakukan illegal fishing ini yang membuat Indonesia terasa sangat dirugikan.

Indonesia mendapatkan kesulitan dalam hal penangkapan. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Indonesia dengan Vietnam untuk masalah perbatasan, belum sepenuhnya clear. Indonesia tidak bisa tidak melawan penangkapan ikan IUU dan banyak dari kebijakan dan tindakan mereka disambut baik oleh masyarakat internasional, terlepas dari sifat kontroversial dari kapal penangkap ikan yang kadang-kadang ditenggelamkan di depan umum.

Dimensi lokal dari IUU Fishing seringkali diabaikan dan/atau diabaikan. Nelayan lokal dan masyarakat nelayan adalah bagian dari masalah tetapi juga harus menjadi bagian dari pemecahan masalah seperti yang ditunjukkan dalam artikel ini. Lebih banyak perhatian perlu diberikan pada peningkatan struktur tata kelola yang inklusif, perumusan dan implementasi kebijakan dan peraturan yang mempertimbangkan masyarakat nelayan lokal dan nelayan, serta kerja sama yang akuntabel antara otoritas pemerintah lokal dan nasional.

Hubungan bilateral antara Indonesia-Vietnam telah diuji dengan kebijakan Tenggelamkan Kapal, sebuah langkah tegas yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi maraknya illegal fishing yang merambah perairan Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain menyebabkan pembongkaran kapal penangkap ikan Vietnam; dan juga menyebabkan

hampir bentrok dan insiden di laut. Meskipun demikian, hubungan bilateral kedua negara jauh dari kondisi permusuhan, dan menjunjung tinggi hubungan bertetangga untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal.

Singkatnya, pemerintah Vietnam telah berulang kali mengingkari janji untuk mengelola para nelayannya dan memerangi penangkapan ikan ilegal, yang jelas-jelas sangat memengaruhi reputasi nasional Vietnam, merusak kepercayaan dan kepentingan negara-negara pesisir, dan secara serius mengancam lingkungan ekologis dan pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. perikanan di Laut Cina Selatan. Kegiatan semacam itu juga menimbulkan risiko keamanan baru terhadap situasi saat ini di Laut Cina Selatan. Di masa mendatang, Vietnam perlu menyadari keseriusan masalah ini, dan secara aktif memikul tanggung jawab untuk menindak kegiatan penangkapan ikan ilegal, alih-alih berkomplot untuk tujuan lain.

VI. 2 SARAN

Untuk pemerintah Indonesia dan kementerian kelautan harus menambah armada laut dalam menjaga wilayah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan yang hingga saat ini belum adanya titik terang. Kepada pemerintah juga harus lebih banyak mendaftarkan kepada kapal-kapal yang ingin memasuki Kawasan Indonesia menggunakan VMS dikarenakan hal tersebut dapat dikontrol oleh para penjaga laut sehingga hal ini akan menjadikan pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia sendiri. Selanjutnya melalui peningkatan pengawasan, lalu yang kedua tetap berkoordinasi dengan pihak2 terkait (Kemenlu, Kedutaan Vietnam di Indonesia, Kedutaan Indosia di Vietnam dan BAKAMLA) untuk menjaga keamanan wilayah laut, yang ketiga adalah dengan sosialisasi terhadap nelayan2 yang di pesisir untuk supaya tidak melintas batas wilayah antar kedua negara. Yang keempat peningkatan SDM dari Indonesia, untuk bukan hanya memanfaatkan

laut, tetapi untuk bisa mencari alternatif² lain supaya kehidupan, pendapatan, kesejahteraan, masyarakat pesisir tetap stabil, tanpa mereka harus melaut.